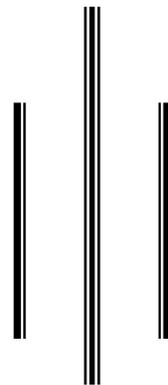




**LAPORAN KINERJA
TAHUN 2019**

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019**



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN
2019**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena berkat limpahan rahmat dan karunia Nya jua lah, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Laporan ini disusun sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi yang dijabarkan dan tertuang dalam rencana strategis (Renstra) serta Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun-tahun berikutnya.

Demikian disampaikan, untuk bahan selanjutnya dan atas kerjasama semua pihak diucapkan terima kasih.

Kandangan, Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KAB. HULU SUNGAI SELATAN,**



Drs. H. MUHAMMAD NOOR, M.AP
Pembina Utama Madya
NIP. 19660919 198602 1 004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2016 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sejak tahun 2014 berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 7 tahun 2013 tentang Rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 – 2023.

Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Sekretariat Daerah;
2. perumusan kebijakan Sekretariat Daerah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
4. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
6. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Capaian Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 Sasaran IKU, 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum realisasi masing-masing 3 IKU telah dapat diukur capaiannya dan tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target. Sementara 3 IKU yang lain masih belum dapat diukur karena baru dapat diukur setelah berakhir tahun Anggaran.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Sekretariat Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Capaian Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pembentukan Sekretariat Daerah	2
1.3. Susunan Organisasi	3
1.4. Keragaman SDM	5
1.5. Isu Strategis	9
Bab II Perencanaan Kinerja	11
A. Perencanaan Strategis	11
2.1.1. Visi dan Misi	11
2.1.2. Tujuan dan Sasaran	12
2.1.3. Kebijakan, Strategi dan Program	13
B. Indikator Kinerja Utama (IKU)	27
C. Perjanjian Kinerja tahun 2019	32
Bab III Akuntabilitas Kinerja	22
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	
1. Capaian Indikator Kinerja Utama	23
2. Pengukuran kinerja atas perjanjian kinerja	39
3. Evaluasi dan analisa pengukuran kinerja atas perjanjian kinerja ..	43
B. Realisasi Anggaran	52
Bab IV Penutup	58
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel

I.1.	Komposisi Sumberdaya Aparatur di Sekretariat Daerah Kab. HSS Menurut jenis Kelamin	6
I.2	Komposisi Sumberdaya Aparatur Di Sekretariat Daerah Kab. HSS Menurut Pangkat dan Golongan	7
I.3	Komposisi Sumberdaya Aparatur Di Sekretariat Daerah Kab. HSS Menurut Tingkat Pendidikan	8
II.1	Indikator Program dan kegiatan	20
II.2	Indikator Kinerja Utama	28
II.3	Perjanjian Kinerja tahun 2019	32
III.1	Capaian Kinerja Indikator Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019	35
III.2.	Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019	40
III.3	Realisasi Anggaran Sekretariat Daerah Tahun 2019	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi bagian kunci dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Laporan capaian Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat Daerah.

Pada setiap akhir triwulan anggaran setiap instansi melakukan proses penyusunan Laporan Kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, dalam hal ini adalah Sekretariat Daerah.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang

diperlukan dalam penyusunan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukuran secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Dalam lampiran lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja disebutkan bahwa Kepala SKPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Bupati, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

1.2. Pembentukan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sekretariat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut diatas Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Sekretariat Daerah;
2. perumusan kebijakan Sekretariat Daerah berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
3. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
4. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
6. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat daerah; dan

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya..

1.3. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

a. Asisten Administrasi Pemerintahan

1. Bagian Pemerintahan :

- a) Sub Bagian Kewilayahan;
- b) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Tugas Pembantuan;

dan

- c) Sub Bagian Hubungan Antara Daerah dan Lembaga.

2. Bagian Hukum dan Perundang-undangan :

- a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- c) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.

3. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah :

- a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Formasi Jabatan;
- b) Sub Bagian Tata Laksana; dan
- c) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Aparatur Daerah.

4. Bagian Umum :

- a) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
- b) Sub Bagian Perlengkapan;

b. Asisten Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan :

1. Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Tata Usaha :

- a) Sub Bagian Perekonomian dan Pembangunan;
- b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- c) Sub Bagian Penatausahaan, Kepegawaian dan Fasilitas Lembaga Profesi Pegawai Negeri Sipil;

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat :

- a) Sub Bagian Kesejahteraan;
- b) Sub Bagian Fasilitas Kegiatan Keagamaan; dan
- c) Sub Bagian Kerjasama Lembaga Keagamaan.

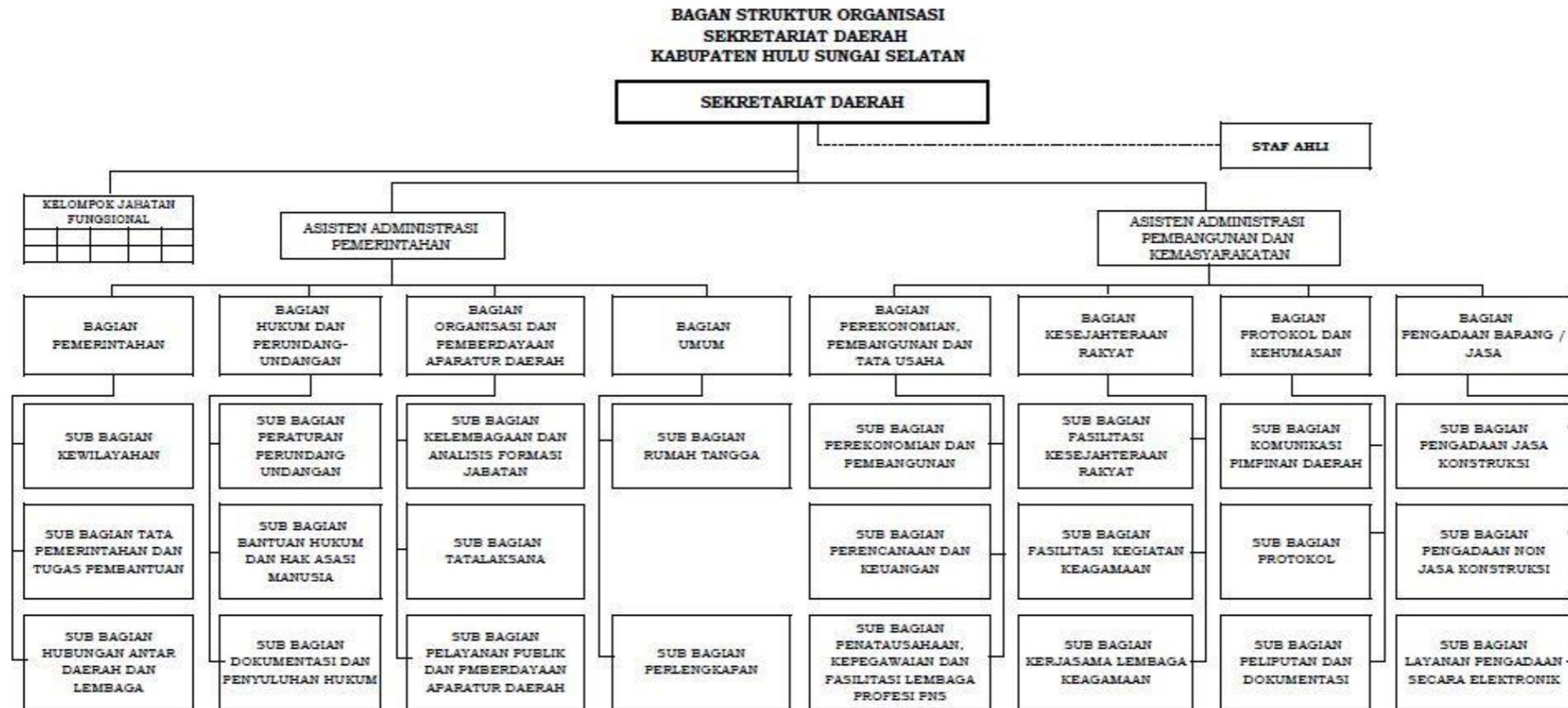
3. Bagian Protokol dan Kehumasan :

- a) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan Daerah;
- b) Sub Bagian Protokol; dan
- c) Sub Bagian Peliputan dan Dokumentasi.

4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa :
 - a) Sub Bagian Pengadaan Jasa Konstruksi;
 - b) Sub Bagian Pengadaan Non Jasa Konstruksi; dan
 - c) Sub Bagian Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :





Gambar I.1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

1.3. Keragaman SDM

Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM/PNS se Sekretariat Daerah per 30 September 2019 sebanyak 98 orang, terdiri dari 66 orang atau 67,35% Laki-laki dan 32 orang atau 32,65% Perempuan. Lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1
 Komposisi Sumber Daya Aparatur di Sekretariat Daerah Kab. HSS
 Menurut Jenis Kelamin

No	SEKRETARIS DAERAH/STAF AHLI/ASISTEN/BAGIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Daerah	1	-	1
2.	Asisten	2	-	2
3.	Staf Ahli	1	-	1
4.	Bagian Pemerintahan	4	5	9
5.	Bagian Hukum dan Perundang-undangan	3	4	7
6.	Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah	3	4	7
7.	Umum	22	5	27
8.	Perekonomian, Pembangunan dan Tata Usaha	6	4	10
9.	Hubungan Masyarakat dan Protokol	8	5	13
10.	Kesejahteraan Rakyat	5	2	7
11.	Pengadaan Barang dan Jasa	11	3	14
JUMLAH		66	32	98

Berdasarkan kepangkatan dan golongan, aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagian besar adalah golongan II yaitu sebanyak 29 orang atau 29,59 % sedangkan golongan

III 56 orang atau 57,14%, golongan IV berjumlah 12 orang atau 12,24 % dan golongan I 1 orang atau 1,02 %. Sebagaimana terlihat pada Tabel I.2 berikut

Tabel II.2
 Komposisi Sumber Daya Aparatur di Sekretariat Daerah Kab. HSS
 Menurut Pangkat dan Golongan

No	SEKRETARIS DAERAH/STAF AHLI/ASISTEN/BAGIAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sekretaris Daerah				1	1
2.	Asisten				2	2
3.	Staf Ahli				1	1
4.	Bagian Pemerintahan			7	1	8
5.	Bagian Hukum dan Perundang-undangan			5	1	6
6.	Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah			6	1	7
7.	Umum	1	19	6	1	26
8.	Perekonomian, Pembangunan dan Tata Usaha		4	5	1	10
9.	Hubungan Masyarakat dan Protokol		4	8	1	13
10.	Kesejahteraan Rakyat		2	4	1	7
11.	Pengadaan Barang dan Jasa		1	12	1	14
JUMLAH		1	29	56	12	98

Sedangkan berdasarkan pendidikan, tingkat pendidikan aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagian besar adalah SLTA dan Sarjana (SI). Aparatur dengan tingkat pendidikan SLTA berjumlah 35 orang atau 35,71 %, Sarjana (S1) sebanyak 40 orang atau 40,81 %, Magister (S2) sebanyak 13 orang atau 13,26 %, Diploma 7 orang atau 7,14 %, SLTP dan SD masing-masing 3 orang atau 3,06 % lainnya adalah berpendidikan SLTP. Jika kita memilah

berdasarkan jenjang pendidikan, menunjukkan bahwa masih perlu peningkatan kapasitas SDM yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel I.3
 Komposisi Sumber Daya Aparatur di Sekretariat Daerah Kab. HSS
 Menurut Tingkat Pendidikan

No	SEKRETARIS DAERAH/STAF AHLI/ASISTEN/BAGIAN	TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	DIPLOMA	S1	S2	S3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sekretaris Daerah						1		1
2.	Asisten						2		2
3.	Staf Ahli					1			1
4.	Bagian Pemerintahan			1	1	6	1		9
5.	Bagian Hukum dan Perundang-undangan			1		5	1		7
6.	Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah					5	2		7
7.	Umum dan Layanan Pengadaan Barang /Jasa	1	1	21	1	2	1		27
8.	Perekonomian dan Pembangunan			5		4	1		10
9.	Hubungan Masyarakat dan Protokol			5	1	7			13
10	Kesejahteraan Rakyat		1	1	1	3	1		7
11	Tata Usaha dan Fasilitasi Lembaga Profesi PNS			1	3	7	3		14
JUMLAH		1	2	35	7	40	13		98

1.4. Isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berkepanjangan dan terkait dengan pencapaian tujuan di masa mendatang. Pemilihan isu strategis di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: (i) merupakan tugas dan tanggung jawab Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; (ii) besarnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik; (iii) tingkat kemungkinan/kemudahan penanganan; (iv) memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan; (v) memiliki daya ungkit terhadap pencapaian untuk pembangunan daerah; (vi) janji politik yang harus diwujudkan.

Isu-isu strategis yang menjadi prioritas bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja.

Sebagai Organisasi yang bertugas membantu Bupati dalam pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, maka permasalahan pelayanan dan akuntabilitas kinerja merupakan faktor utama yang sangat penting bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan

Isu ini sangat penting karena upaya peningkatan kinerja ini dalam rangka mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik..

3. Produk Hukum Daerah sesuai Peraturan perUndang-undangan.

Isu ini sesuai dengan prinsip pembentukan produk hukum daerah dimana produk hokum tersebut harus mengacu dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga dapat dicapai harmonisasi produk Hukum daerah sesuai peraturan perUndang-Undangan

4. Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa.

Proses pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu isu yang sangat banyak diangkat dan dibicarakan terkait dengan program pemberantasan Korupsi, dalam hal ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai pelaksana dalam layanan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki komitmen dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan

jasa yang transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta turut serta dalam rencana aksi pemberantasan korupsi.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

2.1.1. Visi dan Misi

Visi adalah pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana organisasi harus dibawa. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan, berisi cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Kehidupan organisasi pemerintah sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal serta paradigma baru otonomi, oleh karena itu Visi organisasi harus mampu mengakomodasikan perubahan tersebut.

Sejalan dengan paradigma baru pemerintahan dalam era reformasi, perlu dilakukan upaya dalam menyiasati tuntutan perubahan struktur maupun kultur, untuk itu Sekretariat Daerah dituntut untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan profesionalisme serta secara proaktif melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut. Berdasarkan pokok-pokok pikiran tersebut dan mengacu Visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka dirumuskan Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 – 2023 yaitu :

**“ MENUJU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN YANG CERDAS,
INOVATIF, TEKNOLOGIS DAN AGAMIS UNTUK MENWUJUDAN
KESEJAHTERAAN DUNIA DAN AKHIRAT ”**

Melalui Visi tersebut Sekretariat Daerah akan menjadi unit kerja yang profesional dan berperan sebagai koordinator, fasilitator serta advisor dalam merumuskan kebijakan publik sehingga diharapkan akan dapat mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih akuntabel.

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Sekretariat Daerah haruslah mempunyai Misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan agar tujuan organisasi terlaksana dengan baik. Pernyataan Misi membawa organisasi Pemerintahan kepada satu fokus sekaligus merupakan tonggak dari

perencanaan strategis dan sebagai langkah aksi (*action plan*) perwujudan cita-cita yang merupakan landasan kerja yang harus diikuti

Berdasarkan Visi Sekretariat Daerah maka ditetapkan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.
- b. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
- c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian.
- d. Mengoptimalkan sumber daya daerah, berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- e. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu (apa) yang akan dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Tujuan Sekretariat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang dapat dirumuskan sebagai berikut Meningkatkan Tata Kelola Sekretariat Daerah yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis TI.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan melalui tindakan-tindakan yang memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Secara rinci sasaran Sekretariat Dearah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik

2. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum pemerintahan dan organisasi.
3. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketata usahaan,
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
5. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif

2.1.3. Kebijakan, Strategi dan program

a. Strategi dan Kebijakan

Selanjutnya misi-misi tersebut dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan yang ditetapkan untuk dapat mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai dari pernyataan visi.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dikemukakan dengan format tabel sebagai berikut :

VISI : " MENUJU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN YANG CERDAS, INOVATIF, TEKNOLOGIS DAN AGAMIS UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DUNIA DAN AKHIRAT"			
MISI 5 : Menghadirkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan yang Agamis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan	- Mengkaji, merumuskan kembali SOTK, tupoksi organisasi dan sistem ketatalaksanaan pemerintah daerah sehingga mencerminkan visi, misi, target dan prioritas pembangunan
			- Penguatan kapasitas aparatur dalam melakukan inovasi, menjamin tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan penegakan peraturan daerah

	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi hukum pemerintahan dan organisasi	Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan	Penguatan kapasitas aparatur dalam melakukan inovasi, menjamin tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan penegakan peraturan daerah
	Meningkatnya Pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan dan ketata usahaan	Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan	Penguatan kapasitas aparatur dalam melakukan inovasi, menjamin tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan penegakan peraturan daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan pengadaan barang/jasa	Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan	Penguatan kapasitas aparatur dalam melakukan inovasi, menjamin tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan penegakan peraturan daerah
	Meningkatnya Kehidupan Sosial keagamaan	Mengembangkan sistem Pemerintahan yang Integratif melalui Institusionalisasi Inovasi dan reformasi birokrasi dalam proses bisnis di semua level Pemerintahan	Penguatan kapasitas aparatur dalam melakukan inovasi, menjamin tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan penegakan peraturan daerah

b. Program

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana Capaian Kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan

keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi instansi untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Pada tahun 2018 - 2023, Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan 14 program, antara lain :

1. Program peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah
2. Program peningkatan Kualitas pelayanan Publik
3. Program perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Aparatur Daerah
4. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Program Implementasi Kerjasama Pemerintahan Daerah
6. Program Perumusan Kebijakan Penerapan Hukum dan Perundang-Undangan
7. Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah
8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa
9. Program Pelayanan Keprotokolan dan Kehumasan Pimpinan Daerah
10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Bupati dan Wakil Bupati
13. Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
14. Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Pembangunan

Indikator kinerja adalah sejumlah indikator yang akan dicapai melalui sejumlah program yang akan dilaksanakan pada Tahun 2019 - 2023. Indikator ini dikelompokkan menurut Visi dan Misi yang pada dasarnya indikator ini adalah indikator-indikator sasaran guna mencapai program-program yang telah ditetapkan sesuai dengan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Indikator Program dan kegiatan untuk menunjang visi dan

misi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel. II.1
 Indikator Program dan Kegiatan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Makanan dan Minuman	Bulan layanan penyediannya makanan dan minuman dalam rangka menunjang kegiatan-kegiatan Setda Kab. HSS
		Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Bulan layanan penyediannya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
		Penyedia Jasa dan Administrasi kantor	Bulan layanan penyediannya jasa adminstrasi kantor
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Telpon, listrik dan Air yang terbayarkan
		Penyeberluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Bulan layanan penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD
		Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
		Rapat-Rapat Koordinasi, Konsultasi dan Lapangan	Bulan layanan pelaksanaan rapat koordinasi, konsultasi dan lapangan
2	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan dinas/opersioanal yang disediakan
		Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur disediakan
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor dalam kondisi baik
		Pemeliharaan rutin /berkala rumah jabatan	Tersedianya rumah jabatan yang

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja
			representatif
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.	Tersedianya gedung kantor yang layak digunakan
		Pemeliharaan Rutin/Berkala mobil jabatan	Mobil jabatan dalam kondisi baik dan siap pakai
		Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas /operasional	Kendaraan dinas dalam kondisi baik dan siap pakai
		Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang layak digunakan
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor.	Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor sehingga layak digunakan
3	Program Peningkatan, Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu
		Penyusunan Dokumen AKIP	Jumlah Laporan AKIP yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu
4	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan petunjuk teknis pembinaan usaha sekolah	Jumlah dokumen Juknis Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah
		Pelayanan penyelenggaraan haji daerah.	Seleksi TPHD
		Pelaksanaan pelayanan kegiatan keagamaan	Jumlah Pelayanan Kegiatan Keagamaan
		Penghargaan kepada masyarakat berprestasi	Jumlah Masyarakat berprestasi yang mendapatkan Penghargaan
		Pelaksanaan MTQ tingkat provinsi dan pengiriman kafilah tingkat nasional	Jumlah Kafilah dan pendamping yang mengikuti MTQ Tingkat Propinsi dan Pusat

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja
		Pembinaan hafiz dan hafizah al qur'an	Jumlah santri ponpes menghafal al quran
		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan
		Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	Pelayanan Sesuai Standar
		Pelaksanaan Program Kerja KORPRI	Terlaksananya Program Kerja KORPRI
		Pengelolaan Penerimaan Zakat	Persentase peningkatan penerimaan zakat
5	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Penyusunan LKPJ dan LPPD Kepala Daerah	Laporan LPPD
		Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Unsur Pejabat Pemerintahan dalam 1 tahun
		Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi	Persentase peningkatan administrasi pemerintahan dan kewilayahan
6	Perumusan Kebijakan Penerapan Hukum dan Perundang-undangan	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Produk Hukum Daerah
		Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Sosialisasi Perda dilaksanakan
		Publikasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Informasi Produk hukum daerah
		Penyusunan Dokumen dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	Jumlah Kegiatan RANHAM yang difasilitasi
		Penyuluhan Hukum Terpadu	Jumlah Kegiatan penyuluhan Hukum yang dilaksanakan
		Peningkatan Pelayanan Penanganan Perkara	Persentase permasalahan hukum yang ditangani

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja
7	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Jumlah AKIP Pemkab HSS
		Penguatan Reformasi Birokrasi	Jumlah SKPD diFasilitasi
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Jumlah inovasi yang lolos nasional
		Ketatalaksanaan di Lingkungan Pemkab. HSS	Persentase Pembuatan KTP PNS yang dikeluarkan tepat waktu
		Penataan Prosedur Kerja di Lingkungan Pemkab. HSS	Jumlah Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
		Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah Proposal Inovasi Pelayanan Publik
		Penataan Prosedur Kerja Ketatalaksanaan di Lingkungan Pemkab. HSS	Persentase pembuatan KTP PNS tepat waktu dan Laporan SKM
9	Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Aparatur Daerah	Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan Organisasi dan Aparatur Daerah	Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran
		Pengkajian Kelembagaan dan Analisis Formasi Jabatan Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil kajian dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah
10	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Bupati dan Wakil Bupati	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Bupati dan Wakil Bupati	Tingkat kepuasan Pelayanan Pimpinan Daerah
		Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara / departemen/ lembaga pemerintah non departemen / luar negeri	Pelayanan Sesuai Standar
		Urusan Rumah Tangga KDH / WKDH	Pelayanan Sesuai Standar
11	Program Pelayanan Keprotokolan dan Kehumasan Pimpinan Daerah	Pelayanan Keprotokolan dan Kehumasan Pimpinan Daerah	Tingkat kepuasan Pelayanan Pimpinan Daerah
		Keprotokolan Acara Bupati dan Kegiatan Pemerintah Daerah	Tingkat Kepuasan pelayanan
		Peliputan dan	Tingkat Kepuasan

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja
		Dokumentasi kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	elayanan
		Komunikasi Pelaksanaan Tugas Pimpinan Daerah	Tingkat Kepuasan pelayanan
12	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/jasa	Persentase PD yang melaksnakan PBJ melalui ULP
		Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	Persentase paket Lelang yang dilaksanakan
		Pembinaan SDM, Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Sosiaslisi peraturan terkait pengadaan barang/Jasa Pemerintah, SPSE, SIRUP dan SIKAP
		Bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Bimbingan Teknis Aplikasi SPSE dan SIRUP
		Sosialisasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah Sosialisasi peraturan terkait PBJ
			Persentase pemenuhan Peningkatan standardisasi Sistem LPSE
		Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase jumlah standardisasi yang dicapai
13	Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Pembangunan	Perumusan Kebijakan Ekonomi Pembangunan	Persentase policy brief bidang perekonomian dan pembangunan yang dimanfaatkan Bupati
		Penyusunan Dokumen Pengendalian Laju Inflasi Daerah	Jumlah Dokumen policy brief bidang perekonomian

No	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja
14	Implementasi Kerjasama Pemerintahan Daerah	Penyusunan Dokumen Pengendalian Laju Inflasi Daerah	Jumlah Dokumen policy brief bidang perekonomian
		Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan DPRD, Instansi Vertikal dan SKPD Lingkup Pemkab HSS	Jumlah penyelenggaraan Pemerintah daerah
		Implementasi Kerjasama Pemerintah Daerah	Persentase MOU yang diimplementasikan

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, maka dilakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Sebagai bahan perbandingan ditampilkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018 dan tahun 2019 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tabel sebagai berikut :



Tabel. II.2
 Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan Pemilihan Indikator	Penjelasan / Form Hitungan	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas Kinerja	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Kab. Hulu Sungai Selatan	Sesuai Amanat UU No.25/2009 ttg Pelayanan publik	Jumlah Nilai IKM OPD/ Unit Pelayanan yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat dibagi Jumlah OPD/ Unit Pelayanan yang melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat	80
		Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	Sesuai Amanat UU No.25/2009 ttg Pelayanan publik	Sesuai dengan Peraturan MenPAN No.16 Tahun 2014 tentang survey kepuasan masyarakat	80
		Persentasi keluhan pengaduan layanan yang ditindak lanjuti	untuk lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat	Jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti dibandingkan dengan jumlah pegaduan yang masuk dikali 100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan Pemilihan Indikator	Penjelasan / Form Hitungan	Target
		Nilai hasil evaluasi AKIP Kab. HSS Komponen Pelaporan Kinerja	Untuk memenuhi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Akuntabilitas sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten diukur sesuai dengan PermenPAN No. 20/2013 tentang Juklak Evaluasi AKIP.	A
		Nilai hasil evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	sebagai salah satu hasil kinerja OPD	Hasil Penilaian Inspektorat Kabupaten terhadap Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah	A
		Temuan BPK/inspektorat yang ditindak lanjuti	Sebagai wujud dari akuntabilitas keuangan, dituntut dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas untuk mendukung opini BPK RI atas laporan keuangan	Jumlah temuan BPK ditindak lanjuti dibandingkan jumlah temuan BPK dikali 100%	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan Pemilihan Indikator	Penjelasan / Form Hitungan	Target
			Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan		
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai LPPD	Untuk memenuhi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat, dan ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD).	Nilai LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Tim Nasional atas LPPD tahun sebelumnya, yang dinilai berdasarkan Indeks Komposit dari dua variabel utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) sesuai Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat.	Peringkat 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan Pemilihan Indikator	Penjelasan / Form Hitungan	Target
		Persentasi Kecamatan berkinerja Baik	Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada level Pemerintah tingkat Kecamatan sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat yang ditegaskan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.	Jumlah Kecamatan yang berkinerja baik dibandingkan dengan jumlah Kecamatan yang ada di Kab. HSS dikali 100%	100%
3	Terwujudnya harmonisasi produk Hukum daerah sesuai peraturan perUndang-Undangan	Persentasi Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah	Untuk mengetahui seberapa banyak jumlah Produk Hukum Daerah yang terbit sesuai dengan mekanisme pembentukan Produk Hukum Daerah	Jumlah Perda yang ditetapkan dibandingkan dengan Perda yang diusulkan dikali 100%	100%
4	Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik	Persentasi OPD yang melaksanakan PBJ melalui ULP	Sesuai Amanat Perpres no.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan perubahannya	Jumlah Pengadaan barang dan jasa diproses dibandingkan jumlah Pengajuan proses Pengadaan barang dan jasa yang masuk dikali 100%	100%

Tabel. II.3
 Indikator Kinerja Utama (IKU)
 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan Pemilihan Indikator	Penjelasan / Form Hitungan	Target
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi hukum dan pemerintahan	Persentase Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah	Untuk mengetahui seberapa banyak jumlah Produk Hukum Daerah yang terbit sesuai dengan mekanisme pembentukan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum dan informasi hukum daerah yang sesuai mekanisme pembentukan produk hukum daerah dibagi jumlah produk hukum daerah dan informasi produk hukum daerah yang diajukan/diusulka dikali 100 %	100
		Peningkatan Nilai LPPD Kab. HSS	Memenuhi amanah PP No. 3 Th. 2007 ttg LPPD kpd Pemerintah, LKPJ kpd DPRD, ILPPD kpd Masyarakat	Nilai LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Tim Nasional atas LPPD tahun sebelumnya, yang dinilai berdasarkan Indeks Komposit dari dua variabel utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK)	3.1173

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan Pemilihan Indikator	Penjelasan / Form Hitungan	Target
				sesuai Pera-turan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat	
2.	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	Nilai / Predikat AKIP Pemkab HSS	Komponen penilaian SAKIP berdasarkan Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan oleh KemenPAN RB	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	A

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan Pemilihan Indikator	Penjelasan / Form Hitungan	Target
		Indeks Reformasi Birokrasi	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	23,50
		Jumlah inovasi yang lolos nasional		Jumlah inovasi dari PD yang lolos seleksi tingkat nasional	3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan Pemilihan Indikator	Penjelasan / Form Hitungan	Target
		Tingkat Kepuasan Pelayanan	Kepuasan masyarakat unit pelayanan lingkup Pemkab HSS berdasarkan PermenPAN no.16 Tahun 2014	Persentase pelaksanaan kegiatan	100
		Nilai / Predikat AKIP Setda Kab. HSS	Memenuhi PP 29 tahun 2014 dan Permenpan 53 tahun 2014	Komponen penilaian SAKIP berdasarkan Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan oleh Inspektorat Kab. HSS	A
3.	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan	Persentase Policy Brief bidang perekonomian pembangunan yang dimanfaatkan Bupati	Pelaksanaan tupoksi setda sesuai perbup no 22 tahun 2017	Jumlah Policy Brief yang ada dibagi Jumlah Policy Brief yang dimanfaatkan Bupati dikali 100%	75

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Alasan Pemilihan Indikator	Penjelasan / Form Hitungan	Target
	pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketata usahaan,				
4.	Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif	Persentase Peningkatan Penerimaan Zakat	Peningkatan ketaatan menjalankan kewajiban dalam kehidupan beragama	Jumlah penerimaan zakat tahun berjalan dibagi jumlah penerimaan zakat tahun sebelumnya dikali 100%	9
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PBJ melalui ULP	Sesuai Amanat Perpres no.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan perubahannya	Jumlah Pengadaan barang dan jasa diproses dibandingkan jumlah Pengajuan proses Pengadaan barang dan jasa yang masuk dikali 100%	100
		Persentase pemenuhan Peningkatan standarisasi Sistem LPSE		Jumlah parameter standarisasi LPSE yang sudah dipenuhi dibagi jumlah parameter standarisasi yang harus dipenuhi dikali 100%	70,59

Dari Tabel II.2 dan II.3 diatas dapat dilihat perbandingan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018 dan Tahun 2019 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada Tahun 2018 memiliki 4 (empat) Sasaran Strategis yang ingin dicapai dengan 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Tahun 2019 Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memilik 5 (lima) Sasaran Strategis dengan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU).



C. Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan.

Perjanjian kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah (*top-down*) dan ke samping (*horizontal-diagonal*) dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapi dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara rewiu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Kepala SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*);
- d. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring,

evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD;

- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Bupati Hulu Sungai Selatan dan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel. II.4
 Perjanjian Kinerja (PK) 2019
 Sekretariat Daerah Kab. HSS

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Program	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi hukum dan pemerintahan	Persentasi Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah	%	100	Program Perumusan Kebijakan Penerapan Hukum dan Perundang-undangan	691,044,380
		Peningkatan Nilai LPPD Kab. HSS	Nilai	3.1173	Program Peningkatan Penyelenggaraan pemerintah Daerah	254,050,000

2.	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	Nilai / Predikat AKIP Pemkab HSS	Predikat	BB	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah	309,081,100
		Jumlah inovasi yang lolos nasional	Indeks	3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	178,687,400
		Tingkat Kepuasan Pelayanan	Indeks	82	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	6,866,262,500
		Nilai / Predikat AKIP Setda Kab. HSS	Nilai	BB	Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5,000,000

		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	23,50		
3.	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketatausahaan	Persentase Policy Brief bidang perekonomian pembangunan yang dimanfaatkan Bupati	Policy Brief	75	Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Pembangunan	113,625,000
4.	Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif	Persentase Peningkatan Penerimaan Zakat	Perse	9	Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	64,650,000

5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PBJ melalui ULP	%	100	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa	618,089,000
		Persentase pemenuhan Peningkatan standardisasi Sistem LPSE	%	70,59		541,115,000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1) Capaian Indikator Kinerja Utama

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat.

Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Hasil Capaian Indikator Kinerja utama Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel III.1. Capaian Kinerja Indikator Utama
Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Form Hitungan	Target	Realisasi	%		
1	2	3	5	6				
1.	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi hukum dan pemerintahan	Persentasi Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah	Jumlah produk hukum dan informasi hukum daerah yang sesuai mekanisme pembentukan produk hukum daerah dibagi jumlah produk hukum daerah dan informasi produk hukum daerah yang diajukan/diusulkan dikali 100 %	$\frac{13}{10} \times 100\%$	Triwulan I	10	3	30%
					Triwulan II	10	3	30%
					Triwulan III	10	9	90%
					Triwulan IV	10	13	130%
		Peningkatan Nilai LPPD Kab. HSS	Nilai LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Tim Nasional atas LPPD tahun sebelumnya, yang dinilai berdasarkan Indeks Komposit dari dua variabel utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) sesuai Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat	Triwulan I	3.1173	0		
				Triwulan II	3,1173	0		
				Triwulan III	3,1173	0		
				Triwulan IV	3,1173	3,1502	101,05%	
2.	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	Nilai / Predikat AKIP Pemkab HSS	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran	Triwulan I	A	BB	95,28%	
				Triwulan II	A	BB	95,28%	
				Triwulan III	A	BB	95,28%	

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Form Hitungan	Target		Realisasi	%
			kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	Triwulan IV	A	BB	95,28%
		Jumlah inovasi yang lolos nasional	Jumlah inovasi dari PD yang lolos seleksi tingkat nasional	Triwulan I	3	0	0
				Triwulan II	3	0	0
				Triwulan III	3	0	0
				Triwulan IV	3	0	0
		Tingkat Kepuasan Pelayanan	Hasil Survey kepuasan Pelayanan	Triwulan I	82	0	99,57%
				Triwulan II	82	82,65%	100,79%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Form Hitungan	Target		Realisasi		%		
				Triwulan III	82	82,65%	100,79%			
				Triwulan IV	82	83,85%	102,26%			
		Nilai / Predikat AKIP Setda Kab. HSS	Komponen penilaian SAKIP berdasarkan Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan oleh Inspektorat Kab. HSS	Triwulan I	A	BB	96,52%			
				Triwulan II	A	BB	96,52%			
				Triwulan III	A	BB	96,52%			
				Triwulan IV	A	BB	96,52%			
		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Komponen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%	Triwulan I	23,50	23,05	98,08			
				Triwulan II	23,50	23,05	98,08			
				Triwulan III	23,50	23,05	98,08			
				Triwulan IV	23,50	23,05	98,08			
		3.	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketatausahaan,	Persentase Policy Brief bidang perekonomian pembangunan yang dimanfaatkan Bupati	Jumlah Policy Brief yang ada dibagi Jumlah Policy Brief yang dimanfaatkan Bupati dikali 100%	$\frac{75}{75} \times 100\%$	Triwulan I	75%	25%	33,33%
							Triwulan II	75%	50%	66,67%
Triwulan III	75%						75%	100%		
Triwulan IV	75%						75%	100%		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Form Hitungan	Target		Realisasi		%
4.	Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif	Persentase Peningkatan Penerimaan Zakat	Jumlah penerimaan zakat tahun berjalan dibagi jumlah penerimaan zakat tahun sebelumnya dikali 100%	$\frac{41,29}{9} \times 100\%$	Triwulan I	9%	7%	77,78%
					Triwulan II	9%	7%	77,78%
					Triwulan III	9%	7%	77,78%
					Triwulan IV	9%	41,29%	458,77%
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PBJ melalui ULP	Jumlah Pengadaan barang dan jasa diproses dibandingkan jumlah Pengajuan proses Pengadaan barang dan jasa yang masuk dikali 100%	$\frac{131}{131} \times 100\%$	Triwulan I	100%	10	100%
					Triwulan II	100%	49	100%
					Triwulan III	100%	51	100%
					Triwulan IV	100%	131	131%



2) Pengukuran kinerja atas perjanjian kinerja

Secara umum sebagian besar kegiatan yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Sekretariat Daerah telah dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran 2019. Dari sebagian besar target capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan baru dapat diketahui hasilnya setelah berakhirnya tahun anggaran 2019. Seperti Nilai LPPD kabupaten, Nilai AKIP Sekretariat Daerah, Indeks Reformasi Birokrasi Hasil Capaian Indikator Kinerja utama Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel III.2. Pengukuran Capaian Kinerja Indikator Sasaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Sampai Triwulan IV Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan / Form Hitungan		Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Persentase Capaian
1	2	3	4	5	6	7		
1	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi hukum dan pemerintahan	Persentasi Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah	Jumlah produk dan informasi daerah yang sesuai mekanisme pembentukan produk daerah dibagi jumlah produk daerah dan informasi produk daerah yang diajukan/diusulka dikali 100 %	$\frac{13}{10} \times 100\%$	Persen	10	13	130%
1		Peningkatan Nilai LPPD Kab. HSS	Nilai LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Tim Nasional atas LPPD tahun sebelumnya, yang dinilai berdasarkan Indeks Komposit dari dua 40variable utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) sesuai Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD dan Indeks		Nilai	3,1173	3,1502	101,05%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan / Form Hitungan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Persentase Capaian
			Kesesuaian Materi (IKM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKpj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat				
2	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik	Nilai / Predikat AKIP Pemkab HSS	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	Predikat	A	BB	95,28%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan / Form Hitungan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Persentase Capaian
		Jumlah inovasi yang lolos nasional	Jumlah inovasi dari PD yang lolos seleksi tingkat nasional	Jumlah	3	0	0
		Tingkat Kepuasan Pelayanan	Hasil Survey kepuasan Pelayanan	%	82	83,85	102,26%
		Nilai / Predikat AKIP Setda Kab. HSS	Komponen penilaian SAKIP berdasarkan Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan oleh Inspektorat Kab. HSS	Predikat	A	BB	95,62%
		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang	Indeks	23,50	23,05	98,08

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan / Form Hitungan	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Persentase Capaian
			efektif dan efisien, bersih dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Kompoenen penilaian terdiri dari pengungkit 60% dan hasil 40%				
3.	Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketata usahaan	Persentase Policy Brief bidang perekonomian pembangunan yang dimanfaatkan Bupati	Jumlah Policy Brief yang ada dibagi Jumlah Policy Brief yang dimanfaatkan Bupati dikali 100%	%	75	75	100%
4.	Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif	Persentase Peningkatan Penerimaan Zakat	Jumlah penerimaan zakat tahun berjalan dibagi jumlah penerimaan zakat tahun sebelumnya dikali 100%	%	9 %	41,29%	458,77%
5.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PBJ melalui ULP	Jumlah Pengadaan barang dan jasa diproses dibandingkan jumlah Pengajuan proses Pengadaan barang dan jasa yang masuk dikali 100%	%	100%	100%	100%

Sumber : LKj Bagian-bagian Sekretariat Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan,2019, data diolah



3) Evaluasi dan analisa pengukuran kinerja atas perjanjian kinerja

Pada dasarnya Sekretariat Daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan hingga akhir tahun anggaran 2019 dalam progress pencapaian target sasaran yang hendak dicapai pada Tahun Anggaran 2019. Pada tahun 2019, Sekretariat Daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki 5 sasaran strategis yang akan dicapai dengan 11 Indikator Kinerja Utama. Dari 10 indikator kinerja utama, sampai berakhir tahun anggaran 2018 hampir semua indikator dapat diukur capaian kinerjanya. Hanya 2 indikator yang belum dapat diketahui hasil capaian kinerja sehubungan dengan belum keluarnya hasil evaluasi terhadap indikator tersebut.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Evaluasi terhadap capaian kinerja sekretariat daerah dilakukan pada pencapaian misi, sasaran dan tujuan yang direncanakan dalam Rencana strategis Sekretariat Daerah 2018-2023.

Tujuan 1 Meningkatkan Tata Kelola Sekretariat Daerah yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis TI

Sasaran 1. Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan administrasi hukum dan pemerintahan

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TRIWULAN	TARGET 2019	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
				2019	
Persentasi Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah	Persen	TW I	10	3	30%
		TW II	10	3	30%
		TW III	10	9	90%
		TW IV	10	13	130%
Peningkatan Nilai LPPD Kab. HSS	Nilai	TW I	3.1173	0	
		TW II	3,1173	0	
		TW III	3,1173	0	

		TW IV	3,1173	3,1502	101,05%
--	--	-------	--------	--------	---------

Indikator 1. Persentasi Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TRIWULAN	TARGET 2019	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
				2019	
Persentasi Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Mekanisme Pembentukan Produk Hukum daerah	Persen	TW I	10	3	30%
		TW II	10	3	30%
		TW III	10	9	90%
		TW IV	10	13	130%

Indikator ini dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Raperda yang sudah ditetapkan}}{\text{Jumlah raperda yang diusulkan}} \rightarrow \frac{13}{10} \times 100\%$$

Perbandingan capaian Jumlah Raperda yang sudah ditetapkan terhadap target kinerja dan capaian sebelumnya juga dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Dokumentasi Kegiatan Penyusunan Rencana kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Sosialisasi Produk Hukum yang dilakukan oleh Bagian Hukum dan Perundang-undangan Tahun 2019.

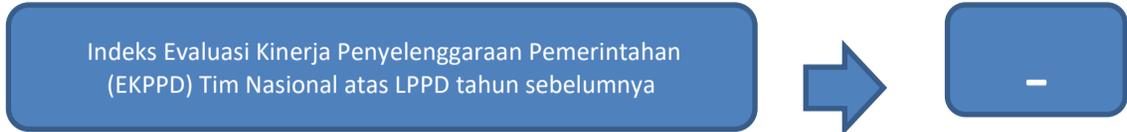


Indikator ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah Produk Hukum Daerah yang terbit sesuai dengan mekanisme pembentukan Produk Hukum Daerah. Hingga berakhir tahun Anggaran 2019 jumlah raperda yang diusulkan sebanyak 13 Raperda dan sudah ditetapkan sebagai Perda. Pada tahun 2018 dan 2019 Raperda yang diusulkan dan sudah ditetapkan menjadi perda sudah melebihi target yang dicanangkan yaitu 10 perda.

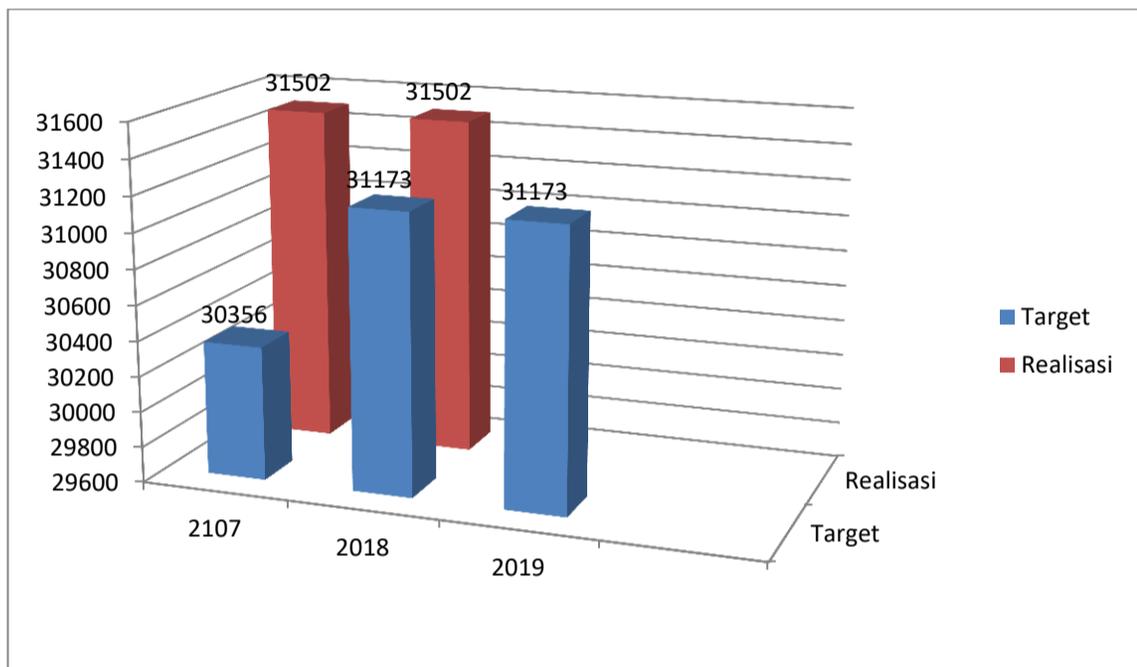
Indikator 2. Meningkatnya Nilai LPPD

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TRIWULAN	TARGET 2019	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
				2018	
Nilai LPPD Kab. Hulu Sungai Selatan	Nilai	TW I	3.1173	0	
		TW II	3,1173	0	
		TW III	3,1173	0	
		TW IV	3,1173	3,1502	101,05%

Indikator ini dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :



Perbandingan capaian Nilai LPPD Kab. HSS terhadap target kinerja dan capaian sebelumnya juga dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Nilai LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Tim Nasional atas LPPD tahun sebelumnya, yang dinilai berdasarkan Indeks Komposit dari dua variabel utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) sesuai Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKPj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat. Berpedoman dari hasil penilaian LPPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2019. Hasil evaluasi LPPD kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 secara pelaporan dan data dukung yang disampaikan sudah jauh lebih baik dibandingkan periode evaluasi tahun sebelumnya, penyajian data juga sangat memuaskan tetapi masih ada kelemahan yang ada dalam laporan LPPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan nilai LPPD kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2019 antara lain pemantapan dan validasi data pendukung LPPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Indeks Kesesuaian Materi dalam LPPD. Sehingga untuk peningkatan dan perbaikan LPPD periode evaluasi tahun 2020 sangat diperlukan dukungan dan kerjasama dari semua SKPD yang ada dalam

lingkup Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terutama dalam hal ketersediaan data dukung dan Indeks kesesuaian Materi yang ada pada SKPD masing-masing. Untuk evaluasi LPPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 akan diketahui hasilnya pada bulan agustus tahun 2020.

Dokumentasi Kegiatan Asistensi Penyusunan LPPD dan Pengisian Indikator Kinerja (IKK) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 dengan Tim Evaluator dari Kemendagri.



Rencana tindak lanjut (Action Plan) yang dilakukan untuk peningkatan Nilai LPPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2019 ditargetkan untuk menaikkan peringkat dan nilainya dibandingkan dengan tahun 2019 dengan dilaksanakannya kegiatan Asistensi Pengisian Indikator Kinerja (IKK) untuk menaikkan nilai capaian yang ada di LPPD dengan Tim Penyusun LPPD yang menyajikan IKK dan data dukung yang valid serta akan dievaluasi oleh Tim Evaluator dari Kemendagri. Sehingga untuk peningkatan dan perbaikan LPPD periode evaluasi tahun 2020 sangat diperlukan dukungan dan kerjasama dari semua SKPD yang ada dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terutama dalam hal ketersediaan data dukung dan Indeks kesesuaian Materi yang ada pada SKPD masing-masing.

Sasaran 2. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan publik pemerintahan

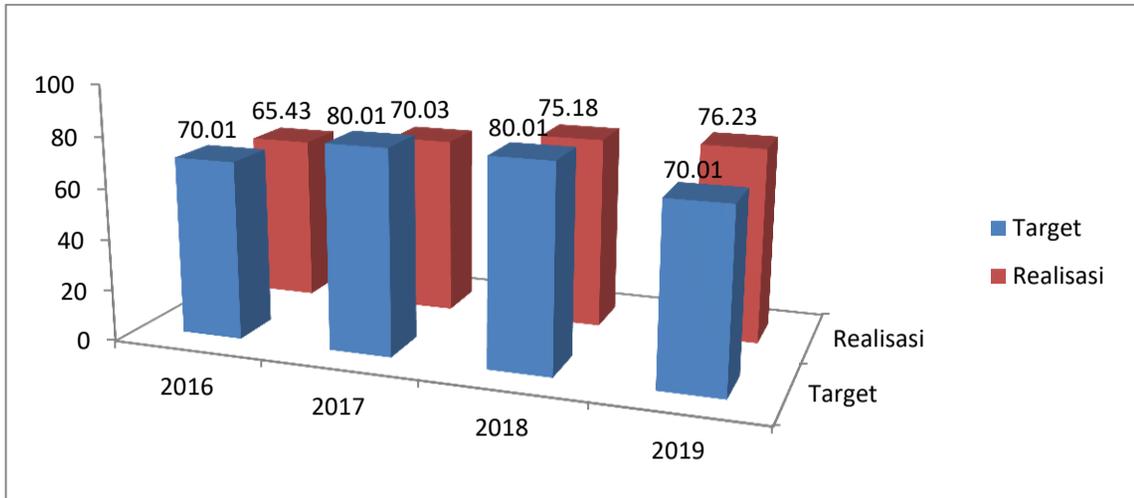
Indikator 1. Nilai / Predikat AKIP Pemkab HSS

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TRIWULAN	TARGET 2019	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
				2019	
nilai hasil evaluasi Akip Pemkab HSS	Nilai	TW I	A	BB	95,28%
		TW II	A	BB	95,28%
		TW III	A	BB	95,28%
		TW IV	A	BB	96,28%

Indikator ini dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :



Perbandingan capaian AKIP Pemkab HSS terhadap target kinerja dan capaian sebelumnya juga dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Dokumentasi kegiatan asistensi penyusunan LAKIP Kabupaten dan Bimbingan Teknik yang diikuti oleh semua SKPD bersama Tim SAKIP Kab. HSS Tahun 2019



Indikator ini merupakan hasil pemeriksaan atas laporan AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2018 yang dilaksanakan pada awal tahun anggaran 2019. Sementara untuk nilai AKIP Sekretariat daerah triwulan IV tahun 2019 sesuai hasil evaluasi dokumen AKIP yang disampaikan ke Tim Evaluator SAKIP dari KemenPAN RB memberikan hasil yang cukup bagus dimana

nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2019 mendapat hasil 76,23.

Tindak lanjut yang dilakukan dengan kegiatan asistensi yang dilakukan dengan Tim SAKIP Pemkab HSS untuk peningkatan nilai SAKIP

Pemkab HSS dengan melakukan cakupan /ruang lingkup implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah :

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian, dan sistem pengukuran kinerja;
 2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja
 3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan, dan
 4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.
- Dengan adanya kegiatan asistensi dan bimbingan teknis yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan nilai SAKIP Pemkab HSS yang menargetkan nilai A untuk tahun 2020.

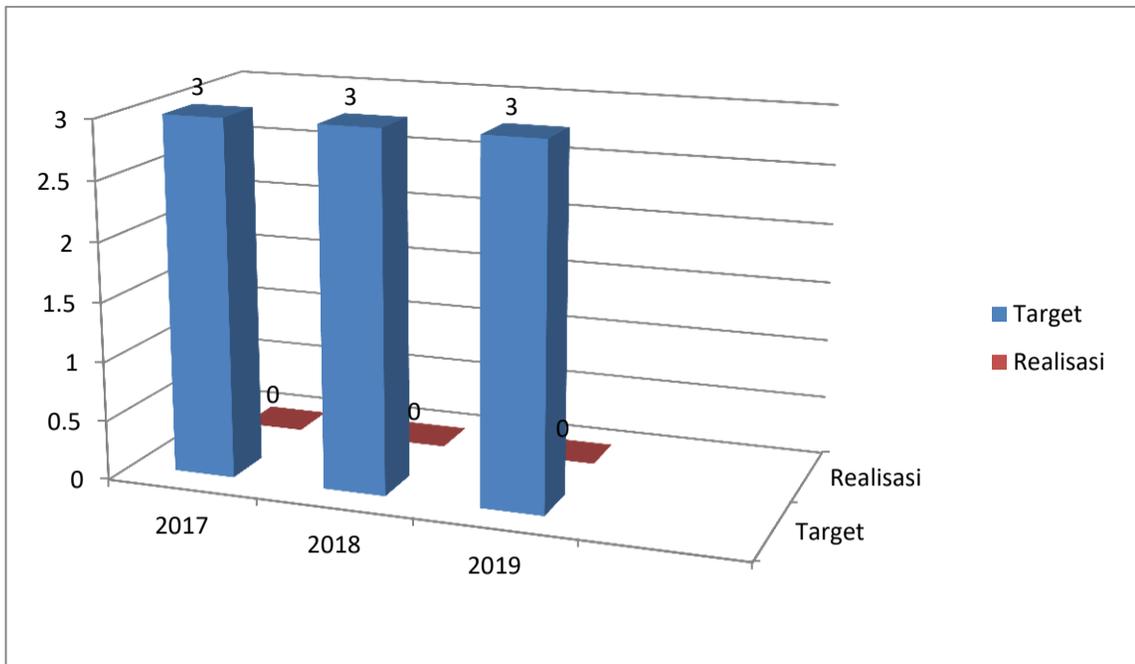
Indikator 2. Jumlah inovasi yang lolos nasional

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TRIWULAN	TARGET 2019	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
				2019	
Jumlah inovasi yang lolos nasional		TW I	3	0	0
		TW II	3	0	0
		TW III	3	0	0
		TW IV	3	0	0

Indikator Jumlah inovasi yang lolos nasional dihitung dengan menggunakan cara sebagai berikut :



Perbandingan capaian Jumlah inovasi yang lolos ke tingkat nasional terhadap target kinerja dan capaian sebelumnya juga dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Indikator ini salah satu upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam mewujudkan daerah yang penuh inovasi dan kreativitas. Sayangnya dari semua proposal inovasi yang sudah diusulkan ke Kemenpan dan Kemendagri pada tahun anggaran 2019 belum ada yang berhasil lolos ke tingkat nasional. Hal ini perlu menjadi bahan perhatian dan pembelajaran dalam pengajuan proposal inovasi berikutnya. Sehingga proposal inovasi yang diajukan lebih kompeten dan bisa memenuhi ekpektasi yang diharapkan.

Dokumentasi Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019



Rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk jumlah inovasi yang diusulkan SKPD lolos di tingkat nasional, yaitu dilakukan pendampingan ke SKPD untuk penyusunan proposal inovasi yang diusulkan baik dari eksternal yaitu dari KemenPAN RB dan internal yang dilakukan oleh Bagian Organisasi dan PAD Setda Kab. HSS, serta kolaborasi dengan Bidang Litbang Bappelitbangda untuk asistensi isi proposal inovasi (akademisi dan dana narasumber dari Litbang Bappelitbangda).

Indikator 3. Indeks Kepuasan Pelayanan

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TRIWULAN	TARGET 2019	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
				2019	
Indeks Kepuasan Pelayanan	Nilai	TW I	82	0	99,57%
		TW II	82	82,65%	100,79%
		TW III	82	82,65%	100,79%
		TW IV	82	83,85%	102,26%

Survey Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara berkala minimal dilaksanakan satu kali dalam periode tahun anggaran. Indikator merupakan hasil dari survey yang dilaksanakan oleh OPD yang melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat yang dilaksanakan pada sebelum berakhirnya tahun anggaran. Sebelum berakhir tahun 2019, dilaksanakan survey kepuasan masyarakat dengan tujuan melihat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Selatan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan sehingga pada akhir tahun anggaran dapat dicapai target yang dicanangkan. Performans Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Sekretariat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

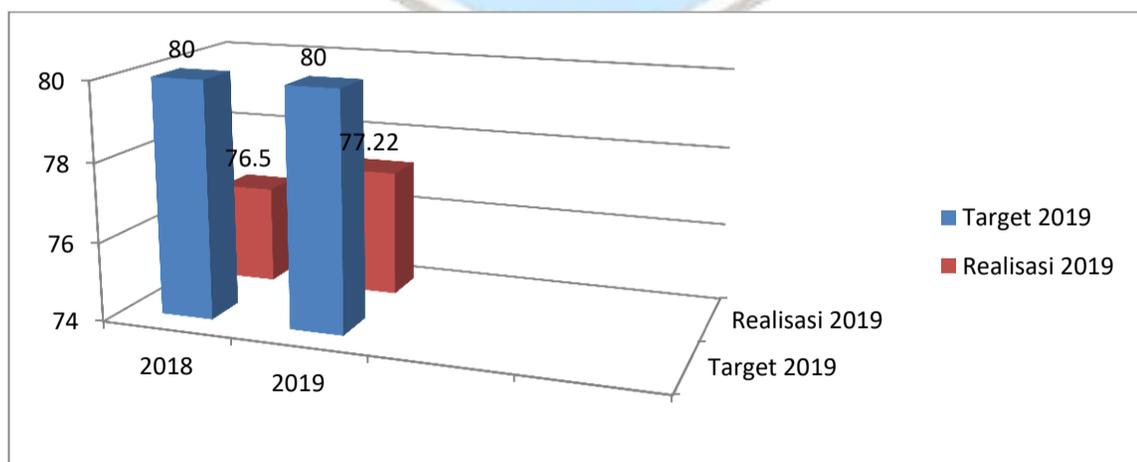


Jika dibandingkan performans Indeks Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang diberikan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki grafik positif terlihat dari Grafik capaian Indeks Kepuasan Masyarakat, mulai tahun 2017 mengalami penurunan trend hal ini perlu disikapi dengan peningkatan kualitas pelayanan, perbaikan, penataan dan pengembangan inovasi dalam sistem pelayanan yang diberikan kepada masyarakat kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diterapkan oleh Sekretariat Daerah Kab. HSS diharapkan masyarakat semakin puas dan dimudahkan dalam mengakses pelayanan yang ada di Sekretariat Daerah kabupaten Hulu Sungai. Pencapaian kinerja Sekretariat Daerah sudah cukup bagus pada tahun 2019 dengan hasil Survey Kepuasan Masyarakat pada akhir tahun 2019 adalah 83.85. Nilai Survey ini merupakan rata – rata hasil survey 4 Bagian yang sudah melaksanakan survey Kepuasan masyarakat. Hasil Survey ini sudah melebihi target yang dicanangkan yaitu 82.

Indikator 4. Nilai hasil evaluasi Akip Sekretariat daerah

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TRIWULAN	TARGET 2019	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
				2019	
nilai hasil evaluasi Akip Sekretariat daerah	Nilai	TW I	A	BB	95,62%
		TW II	A	BB	96,52%
		TW III	A	BB	96,52%
		TW IV	A	BB	96,52%

Indikator ini dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :



Indikator ini merupakan hasil pemeriksaan atas laporan AKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran

2019 yang dilaksanakan pada awal tahun anggaran 2019. Evaluasi dokumen AKIP dilaksanakan Inspektorat pada periode triwulan I sehingga hasil evaluasi baru dapat diketahui pada Triwulan II. Untuk hasil evaluasi dokumen SAKIP Sekretariat Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan yang disampaikan kepada Inspektorat pada tahun 2019 memperoleh hasil 77,22 dengan predikat BB. Hasil ini belum mencapai target yang dicanangkan yaitu predikat AKIP A. akan tetapi pencapaian ini sudah mengalami trend positif dan terus meningkat sehingga pada tahun berikut dapat dicapai hasil sesuai target. Tahun anggaran 2019 ini diharapkan hasil evaluasi AKIP lebih baik dari tahun sebelumnya yang mendapatkan hasil evaluasi AKIP sebesar 76,50 atau dengan predikat BB.

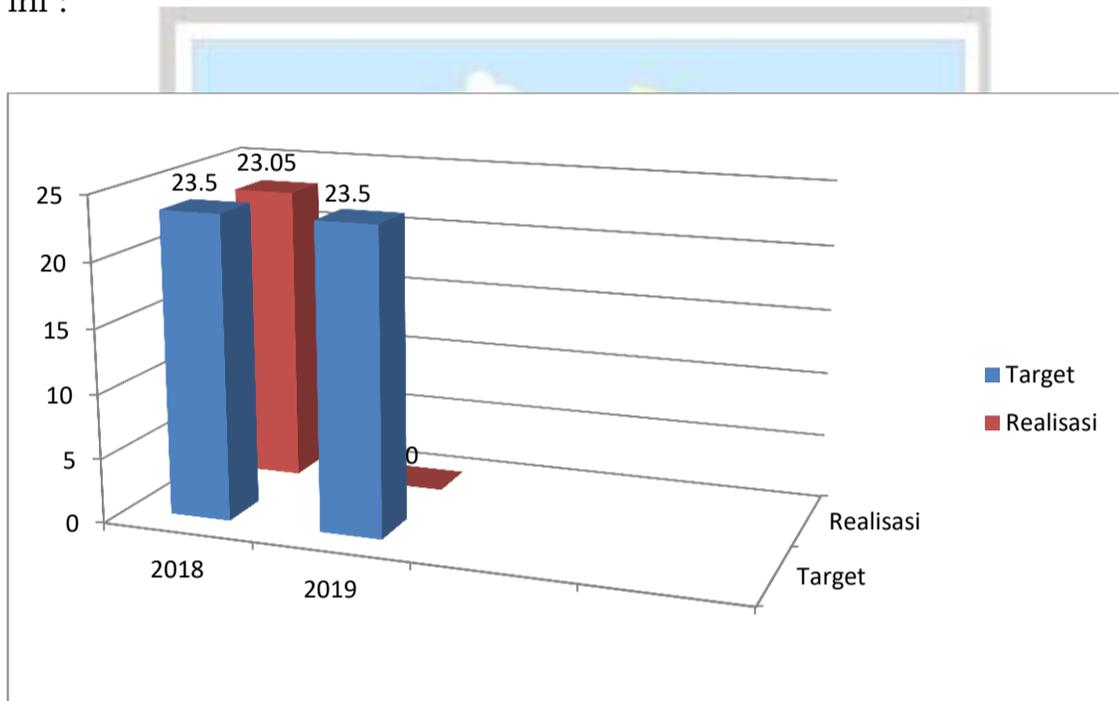


Kegiatan untuk meningkatkan nilai evaluasi AKIP Sekretariat Daerah beberapa langkah-langkah yang diambil dalam tahun anggaran 2020 antara lain dengan melakukan review terhadap Renstra Sekretariat Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan dengan memperbaiki indikator dari sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih terukur dan dapat dicapai. Selain itu juga perlu dilakukan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan tujuan lebih terkoordinir pelaporan Akuntalibitas Sekretariat Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan dan laporan dapat diselesaikan tepat waktu.

Indikator 5. Indeks Reformasi Birokrasi

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TRIWULAN	TARGET 2019	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
				2019	
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	TW I	23,50	23,05	98,08
		TW II	23,50	23,05	98,08
		TW III	23,50	23,05	98,08
		TW IV	23,50	23,05	98,08

Perbandingan capaian Indeks Reformasi Birokrasi terhadap target kinerja dan capaian sebelumnya juga dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Dokumentasi Kegiatan Asistensi Reformasi Birokrasi Tahun 2019



Kegiatan asistensi Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan nilai RB Pemkab HSS dengan bekerjasama dari semua

SKPD dengan memperhatikan langkah- langkah reformasi birokrasi, prinsip penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi, prinsip penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi dan tujuan evaluasi yang di lakukan oleh Tim penilai PMPRB.

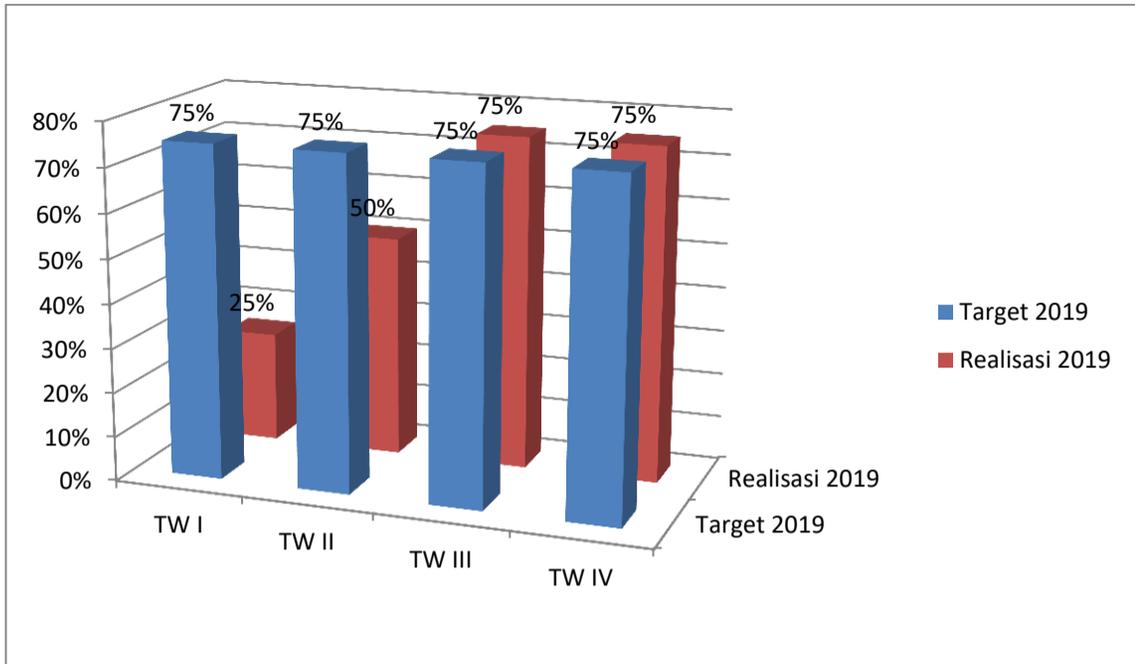
Pada indikator kinerja sasaran I Indeks Reformasi Birokrasi hasil capaian tahun 2019 23,05 dari target 23,50 target tercapai 98%. Sebagai perbandingan dilaporkan capaian tahun 2018 terhadap implementasi tahun 2017 yaitu dari target 23,50 dengan realisasi 22,88 sehingga target tercapai 100%. Sekretariat Daerah tidak melakukan pelayanan publik langsung, melainkan Indeks Reformasi Birokrasi yang diukur adalah pelayanan rutin Sekretariat kepada bidang-bidang baik dalam hal urusan ketatausahaan maupun urusan kepegawaian.

Hasil evaluasi internal yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan didapat dari hasil penilaian tahun 2019 untuk implementasi tahun 2018 dengan target 23,50 dan realisasi yang didapat Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan indeks 23,05. Untuk capaian Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2019 belum bisa ditampilkan karena belum dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sasaran 3. Meningkatnya pembinaan dan pengkoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang perekonomian, pembangunan, ketata usahaan

Indikator 1. Persentase Policy Brief bidang perekonomian pembangunan yang dimanfaatkan Bupati

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TRIWULAN	TARGET 2019	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
				2019	
Persentase Policy Brief bidang perekonomian pembangunan yang dimanfaatkan Bupati	Persen	TW I	75%	25%	33,33%
		TW II	75%	50%	66,67%
		TW III	75%	75%	100%
		TW IV	75%	75%	100%



Dokumentasi Kegiatan Rakor TPID dan CSR Tahun 2019



Rakor TPID yang dilaksanakan sebagai bentuk langkah Pemerintah Daerah dalam penanganan dampak inflasi harga bahan pokok di HSS

dan mencari solusi dan alternatif untuk menekan kenaikan harga sehingga harga bisa terjangkau oleh masyarakat.

*Kegiatan TPID bersama Bupati untuk Pemantauan Harga Pasar Tahun
2019*



Kegiatan pemantauan harga pasar yang dilakukan merupakan hasil dari solusi penanggulangan kenaikan harga pasar yang biasanya terjadi menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri, sehingga Tim TIPD perlu terjun langsung kelapangan untuk mengetahui harga barang yang mengalami kenaikan.

*Kegiatan CSR bersama Bupati dengan penyerahan bantuan Gerobak
untuk PKL (Pedagang Keliling)*



Kegiatan penyerahan bantuan gerobak untuk PKL dari PT. Antang Gunung Meratus (AGM) yang telah menyalurkan Corporate Social Responsibility (CSR) berupa gerobak untuk pedagang kuliner khas kandungan.

Dari kegiatan diatas dapat dilihat untuk persentase policy brief bidang perekonomian dan pembangunan tahun 2019 dengan target 75 % sudah dapat direalisasikan dengan baik yaitu dengan program perumusan kebijakan daerah yang dilaksanakan dengan kegiatan koordinasi dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah yang bekerjasama dengan perusahaan yang memberikan bantuan dananya untuk masyarakat sehingga memudahkan kepala daerah dalam mengambil kebijakan - kebijakan dalam peningkatan perekonomian dan pembangunan daerah.

Sasaran 4. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan yang kondusif

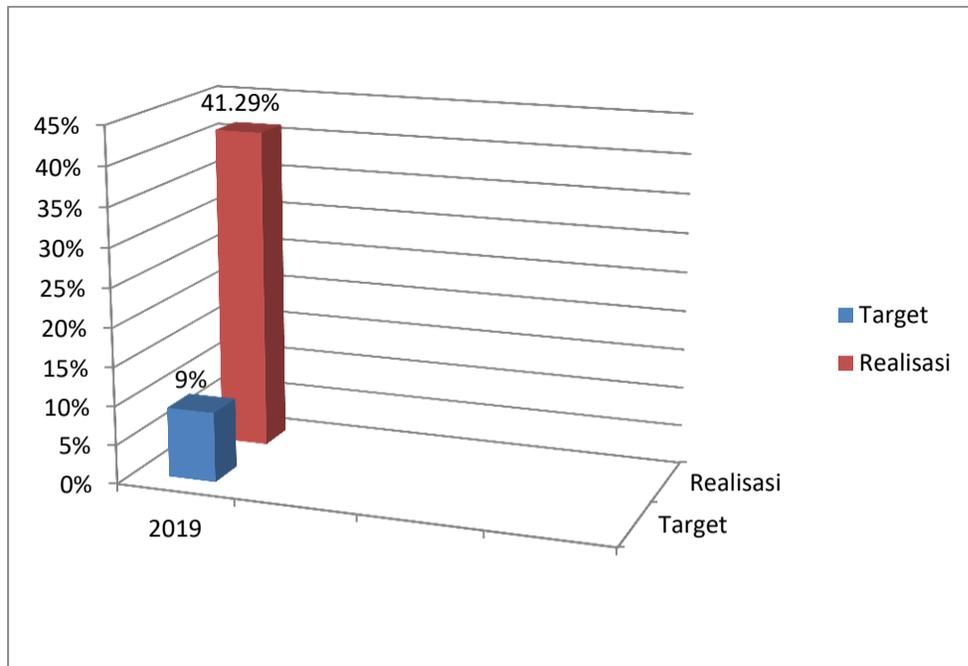
Indikator 1. Persentase Peningkatan Penerimaan Zakat

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TRIWULAN	TARGET 2019	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
				2019	
Persentase Peningkatan Penerimaan Zakat	Persen	TW I	9%	7%	77.78%
		TW II	9%	7%	77.78%
		TW III	9%	7%	77.78%
		TW IV	9%	41,29%	458,7%

Indikator ini dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Zakat tahun 2019} - \text{Jumlah zakat tahun 2018}}{\text{Jumlah zakat tahun 2018}} \times 100\%$$

$$\frac{3.292.596.047 - 2.330.327.647}{2.330.327.647} \times 100\%$$



Pada grafik diatas dapat dilihat peningkatan penerimaan zakat yang signifikan. Indikator ini dicanangkan sebagai salah satu parameter dalam kehidupan sosial keagamaan. Dengan peningkatan penerimaan zakat yang terus meningkat bisa menjadi salah tanda bahwa ada kepatuhan dalam pembayaran zakat dilingkungan pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi BAZNAS bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019



Untuk periode tahun anggaran 2019 realisasi capaian indikator penerimaan zakat mengalami kenaikan yang sangat drastis dimana realisasi capaian peningkatan penerimaan zakat mencapai 41,29% dibandingkan target sebesar 9%. Peningkatan drastis penerimaan zakat ini sangat dipengaruhi dengan adanya edaran dari Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor : 400/120/KESRA/2019 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat Penghasilan/Profesi, Infaq dan Shadaqah. Tanggal 19 September 2019. Dimana pembayaran zakat untuk ASN di lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan langsung dibayarkan bersamaan dengan pembayaran tunjangan kinerja pegawai. Diharapkan realisasi penerimaan zakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dipertahankan dan dapat ditingkatkan semakin lebih baik untuk kedepannya.

Tujuan 5. Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik

Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa

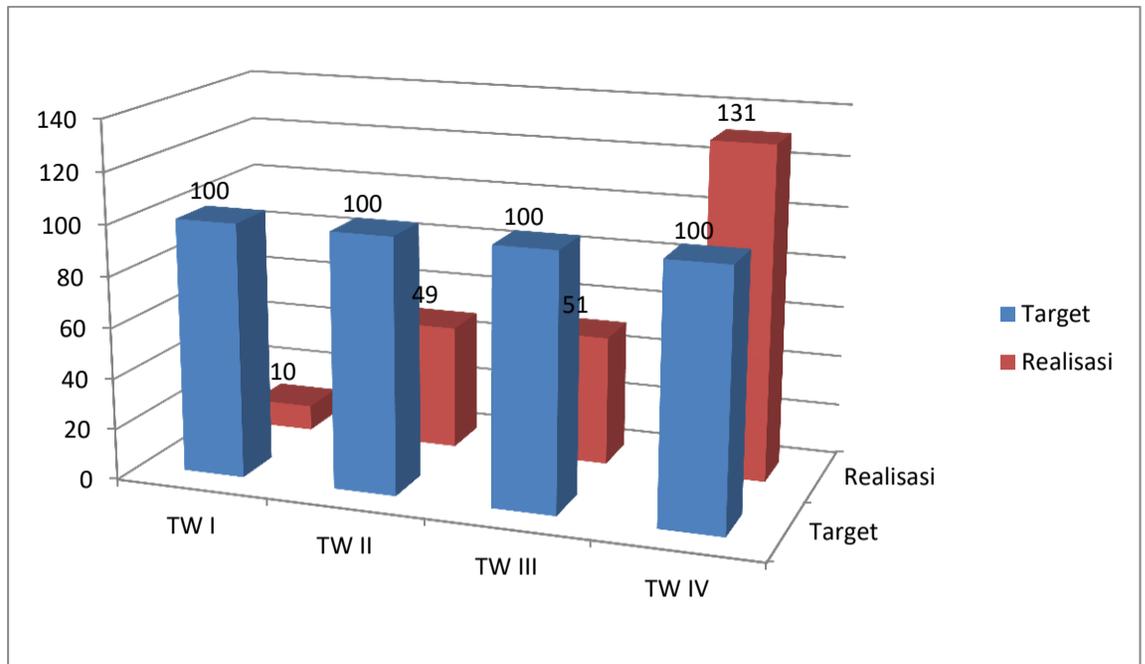
Indikator 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang / Jasa

INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TRIWULAN	TARGET 2019	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
				2019	
Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PBJ melalui ULP	Persen	TW I	100%	10	10%
		TW II	100%	49	49%
		TW III	100%	51	51%
		TW IV	100%	131	131%

Indikator ini dihitung dengan menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Pengadaan barang dan jasa diproses}}{\text{jumlah Pengajuan proses Pengadaan barang dan jasa yang masuk}} \times 100\% \rightarrow \frac{131}{131} \times 100\%$$

Pada grafik dibawah ini ditampilkan perbandingan jumlah pengadaan barang dan jasa yang sudah diproses/dilaksanakan (paket lelang) per triwulan tahun 2019 sebagai berikut :



Indikator ini diperoleh dari total pengajuan pemrosesan pengadaan barang/ jasa yang diajukan ke UKPBJ Kab. Hulu Sungai Selatan dan dari total pengajuan pengadaan tersebut berapa banyak diproses. Hingga Triwulan IV tahun 2019 ini total pengadaan yang sudah diproses oleh UKPBJ Kab. Hulu Sungai Selatan sebanyak 131 Paket Pengadaan dari Total Paket pengadaan yang diusulkan untuk diproses. Berdasarkan hasil tersebut capaian layanan pengadaan barang dan jasa tercapai 100%

Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kab. HSS pada tahun 2019 dapat dianalisa dari tingkat pencapaian program dan kegiatan pada masing-masing Bagian.

1. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah

(1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, sudah terbayarkan semua rekening telpon, air dan listrik yang menjadi tanggungan Sekretariat Daerah selama 1 Tahun.
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran, telah terbayarkan jasa teknis yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah selama 1 tahun dengan jumlah tenaga teknis sebanyak 30 orang.
- c. Kegiatan Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya, telah dilaksanakan pengadaan pakaian dinas untuk KDH/

WKDH, ajudan KDH/WKDH dan Sekda serta tenaga konsumsi lapangan.

2. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada Bagian Pemerintahan
 - (1) Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - a. Kegiatan Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah, telah dapat dilaksanakan koordinasi pejabat pemerintah daerah dalam rangka mengkoordinasikan program dan kegiatan dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - b. Penyusunan LKPJ dan LPPD Kepala Daerah, penyusunan LKPJ dan LPPD sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun secara target capaian untuk kegiatan belum tercapai untuk tahun kemarin.
 - c. Kegiatan Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi, telah dilakukan pemasangan 15 pilar batas untuk daerah yang telah selesai.
 - (2) Implementasi Kerjasama Pemerintahan Daerah
 - a. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan DPRD, Instansi Vertikal dan SKPD Lingkup Pemkab HSS dengan melakukan Koordinasi Pemerintah Daerah dengan Muspida, DPRD, Intansi Vertikal dan SKPD lingkup Pemkab HSS, sudah dilaksanakan koordinasi dan fasilitasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Forkopimda.
3. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan
 - (1) Program Perumusan Kebijakan Penerapan Hukum dan Perundang-undangan
 - a. Kegiatan pelayanan penanganan perkara, telah dilaksanakan Penyelesaian Perkara kepada Unsur Pemerintah Daerah yang Tersangkut Kasus Hukum sebanyak 2 perkara hukum dan di selesaikan dengan baik.
 - b. Kegiatan Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan pelayanan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah yang akan ditetapkan sehingga peraturan yang dikeluarkan sesuai dengan prosedur.
 - c. Kegiatan Sosialisasi peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 8 kegiatan.

- d. Kegiatan Publikasi peraturan perundang-undangan, telah dilaksanakan dokumentasi terhadap produk hukum daerah yang dihasilkan dalam tahun berjalan.
 - e. Kegiatan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia, kegiatan rencana aksi nasional Hak Asasi Manusia dapat dilaksanakan sesuai dengan target yaitu sebanyak 2 kegiatan.
 - f. Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu, dalam pencapaian target kinerja telah dapat dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum sebanyak 7 kegiatan.
4. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat
- (1) Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah
- a. Kegiatan penyusunan petunjuk teknis pembinaan usaha sekolah, kegiatan pembinaan ini ditujukan kepada Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) sebanyak 22 sekolah yang dibina pada kabupaten hulu sungai selatan.
 - b. Kegiatan pelayanan kegiatan keagamaan masyarakat, dalam kegiatan ini pada prinsipnya untuk mendorong agar kegiatan keagamaan semakin membudaya dalam masyarakat dan dalam tahun berjalan sudah dijalankan dengan baik.
 - c. Kegiatan pelayanan penyelenggaraan haji, telah difasilitasi dengan dibentuknya Tim Pemandu Haji Daerah untuk pelayanan penyelenggaraan haji tiap tahun di kabupaten hulu sungai selatan.
 - d. Kegiatan penghargaan kepada masyarakat berprestasi telah terfasilitasinya sebanyak 400 orang warga yang menerima penghargaan dari pemerintah daerah.
 - e. Kegiatan pelaksanaan MTQ tingkat provinsi dan pengiriman kafilah tingkat nasional, kegiatan pelaksanaan MTQ tingkat provinsi sudah difasilitasi dengan jumlah kafilah dan pendampingnya yang mengikuti MTQ sebanyak 100 orang dapat fasilitasi dengan baik.
 - f. Kegiatan pembinaan hafiz dan hafizah Al Qur'an, dalam tahun berjalan sudah dilakukan pembinaan terhadap hafiz dan hafizah Al Qur'an sehingga kegiatan pembinaan ini dapat berjalan lancar dan menghasilkan hafiz dan hafizah

Al Qur'an di kabupaten hulu sungai selatan dengan jumlah santri pondok pesantren penghawal Al Qur'an sebanyak 40 orang.

5. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada Bagian Protokol dan Kehumasan

(1) Program Pelayanan Pelayanan Keprotokolan dan Kehumasan Pimpinan Daerah

- a. Kegiatan Keprotokolan Acara Bupati dan kegiatan Pemerintah Daerah, telah berhasil difasilitasinya semua kegiatan Bupati dan kegiatan Pemerintah Daerah selama 1 tahun.
- b. Kegiatan Komunikasi Pelaksanaan Tugas Pimpinan Daerah, telah berhasil dikomunikasikan terhadap pihak –pihak terkait terkait pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- c. Kegiatan Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, telah berhasil diliput dan didokumentasikan semua kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. HSS.

6. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Tata Usaha

(1) Program Pelayanan Administrasi perkantoran

- a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, telah berhasil menyediakan keperluan benda pos untuk surat menyurat kantor selama satu tahun.
- b. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor telah berhasil menyediakan keperluan alat tulis kantor selama satu tahun
- c. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan telah berhasil menyediakan barang cetakan dan penggandaan selama satu tahun
- d. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Tugas dan Fungsi SKPD, telah dilaksanakan kegiatan pameran dan pawai pembangunan sebagai sarana penyebarluasan informasi pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun berjalan.

- e. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan pembayaran SPPD ke luar daerah.
 - f. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan SPPD dalam daerah.
 - g. Kegiatan Pelatihan/ Outbond Pegawai Setda, telah dilaksanakan kegiatan pelatihan / outbond pegawai setda dengan jumlah peserta 130 Orang dan memberikan pengaruh yang sangat baik dalam pelaksanaan kerja di lingkup Setda kab. Hulu Sungai Selatan.
- (2) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- a. Kegiatan HUT KORPRI, telah dilaksanakan kegiatan PORSENI KORPRI dan upacara peringatan HUT KORPRI pada pelaksanaan program kerja KORPRI.
- (3) Program Peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar relisasi SKPD, telah berhasil dilaksanakan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan selama satu tahun yaitu Revisi Renstra, Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan, Prognosis dan Laporan Keuangan.
- (4) Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Pembangunan
- a. Kegiatan Koordinasi dan Pengendalian Laju Inflasi Daerah, telah dilaksanakan fasilitasi kegiatan pemantauan harga pasar dan rapat koordinasi dalam rangka mengendalikan laju inflasi daerah.
 - b. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Corporate Sosial Responsibility (CSR), telah dilaksanakan rapat-rapat koordinasi dalam rangka pengelolaan CSR antara pemerintah daerah dan BUMD yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada Bagian Umum
- (1) Program pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, telah berhasil menyediakan peralatan dan perlengkapan kantor selama satu tahun.
 - b. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional telah berhasil mencapai terbayarnya pajak dan service kendaraan dinas yang berada dalam pengelolaan bagian umum selama satu tahun.
 - c. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja telah berhasil menyediakan pemeliharaan peralatan kantor selama satu tahun.
 - d. Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor telah berhasil mencapai tersedianya peralatan listrik dan penerangan kantor dan fasilitas lainnya selama satu tahun yang yang dikelola Sekretariat Daerah.
 - e. Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor, telah berhasil disediakan bahan logistik selama 1 tahun untuk kelancaran pelaksanaan kerja di Sekretariat Daerah Kab. HSS.
 - f. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman, telah berhasil mencapai terbayarnya 12 bulan makan minum rapat dan tamu.
- (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- a. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan telah berhasil terpelihara dan laik pakainya sebanyak 4 buah mobil jabatan yang digunakan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah selama 1 tahun.
 - b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, telah berhasil dilaksanakan service penggantian suku cadang kendaraan dinas, serta pembayaran BBM dan pelumas untuk kendaraan dinas/operasional yaitu mobil Kepala Asisten, Staf Ahli, Kepala Bagian, mobil operasional, dan bis operasional.
 - c. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor, telah berhasil dipenuhinya pengadaan perlengkapan gedung

kantor, rumah jabatan Bupati, Asrama mahasiswa di Malang dan fasilitas lainnya yang dikelola Bagian Umum.

d. Kegiatan pengadaan Peralatan gedung kantor, telah berhasil dipenuhinya pengadaan Peralatan gedung kantor, rumah jabatan Bupati, Asrama mahasiswa di Malang dan fasilitas lainnya yang dikelola Bagian Umum seperti pengadaan 10 buah AC Split 1 PK untuk kantor setda, pengadaan 6 buah AC Standing Floor untuk Pendopo Bupati.

e. Kegiatan Pengadaan Meubeleur, telah berhasil dilaksanakan dan dipenuhi pengadaan meubeleur untuk gedung kantor dan fasilitas lainnya yang dikelola Bagian Umum.

f. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala rumah jabatan, telah berhasil dilaksanakan rehab rumah jabatan Bupati dan rumah jabatan wakil bupati.

g. Kegiatan Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor, telah berhasil dilaksanakan rehab gedung kantor berupa perbaikan perbaikan, pengecatan gedung kantor yang sudah rusak.

h. Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor, telah berhasil dilaksanakan rehab ruang Wakil Bupati, Sekda dan asisten serta rehab ruang depan kantor setda.

(3) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

a. Kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara/departemen/lembaga pemerintahan non departemen/luar negeri, telah berhasil difasilitasi kegiatan kunjungan tamu daerah dan dipersiapkan souvenir dan plakat daerah selama 1 tahun.

b. Kegiatan Urusan Rumah Tangga KDH/WKDH, telah berhasil dilayani dan dipenuhi kebutuhan urusan rumah tangga Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah selama 1 tahun.

8. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah

(1) Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah

- a. Kegiatan penguatan Sistem Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, telah dapat difasilitasi kegiatan asistensi dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah selama 1 tahun, salah satu parameter peningkatan adalah dengan terus meningkatnya nilai SAKIP Kabupaten Hulu Sungai Selatan walau secara target yang dicanangkan masih belum terpenuhi.

(2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Kegiatan Ketatalaksanaan di lingkungan Pemkab HSS sebagai berikut :

- Kegiatan pembuatan KTP PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah dapat dilayani pelaksanaan pembuatan KTP PNS selama 1 tahun.
- Kegiatan Evaluasi Jabatan Secara Bertahap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah dilaksanakan Evaluasi Jabatan Secara Bertahap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk 10 OPD selama 1 tahun.
- Kegiatan Kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Secara Bertahap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah dilaksanakan pendampingan dalam penyusunan SOP OPD sebanyak 30 SOP selama 1 tahun.
- Kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan (SP) Secara Bertahap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah dilaksanakan pendampingan dan fasilitasi dalam penyusunan Standar Pelayanan (SP) sebanyak 15 SP selama 1 tahun.
- Kegiatan Pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah dilaksanakan survey kepuasan masyarakat dan difasilitasi kegiatan survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan oleh 45 OPD.
- Kegiatan Pendampingan Penyusunan dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal, telah dilaksanakan pendampingan dalam penyusunan, pelaporan dan evaluasi oleh evaluator untuk Standar pelayanan minimal (SPM).

- b. Kegiatan Penataan Prosedur Kerja di Lingkungan Pemkab HSS telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - c. Kegiatan Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik, belum maksimal dilaksanakan fasilitasi dan pendampingan 20 OPD dalam penyusunan proposal Inovasi pelayanan publik agar sesuai dengan ketentuan. Tetapi sayang dalam tahun berjalan tidak ada inovasi pelayanan publik yang lolos ke tingkat nasional. Untuk peningkatan pengetahuan pada tahun berjalan belum dapat dilaksanakan Bimtek pelayanan publik sehubungan dengan ketidaksiapan pemateri dan narasumber yang sudah dihubungi.
- (3) Program Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan organisasi dan Aparatur Daerah
- a. Kegiatan Pengkajian Kelembagaan dan Analisis Formasi Jabatan Perangkat Daerah yang dilakukan pada Pemerintah Daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
9. Tingkat Pencapaian Program dan Kegiatan pada Bagian Pengadaan Barang/ Jasa.
- (1) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa
- a. Kegiatan Pelayanan pengadaan barang/jasa, telah dapat dilayani permohonan proses pengadaan barang/jasa selama 1 tahun dan dapat dicapai peningkatan Standardisasi LPSE menjadi 10 parameter
 - b. Kegiatan Pembinaan SDM, Konsultasi dan Bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa telah dilaksanakan pembinaan SDM, untuk meningkatkan pengetahuan dalam standar pengadaan barang/jasa sehingga memudahkan OPD untuk mengetahui perkembangan dan sistem yang digunakan untuk pengadaan barang/jasa serta dengan adanya konsultasi yang diberikan oleh bagian PBJ untuk memberikan informasi terkini dalam proses pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bimtek yang diadakan tentang pengadaan barang/jasa diharapkan semua OPD pada pemerintah kabupaten hulu sungai selatan lebih mengetahui prosedur dan tata cara pengadaan barang/jasa.

- c. Kegiatan Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik telah dapat dilayani dengan baik kepada semua OPD melalui program SIRUP, sehingga memudahkan semua OPD untuk menginput kegiatan RUP pada program SIRUP pengadaan barang/jasa.

B. Relisasi Anggaran

Realisasi Anggaran total untuk semua Bagian yang ada dalam lingkup Sekretariat Daerah triwulan IV tahun 2019 sebesar Rp. 23.956.309.029,- atau sebesar 75,79% dari total anggaran Rp. 31.607.743.030,- Besar anggaran belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.3. Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah Kab. HSS

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran		Realisasi Kinerja dan anggaran		
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	
A	SEKRETARIAT DAERAH						
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.815.999.600		1595.374.803
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening listrik, telepon, air yang terbayar	30 rekening	1.184.199.600	30 rekening	1,060,600,129	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	30 orang PTT	30 Orang	631.800.000	30 Orang	534.774.674	
	Program peningkatan pelayanan kinerja perangkat daerah				463,875,000		175.343.500
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas untuk Aparatur yang disediakan	188 stel	463,875,000		175.343.500	
B	BAGIAN PEMERINTAHAN						
	Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah				1,136,503,900		727.272.050
	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	Terkoordinasikannya pelaksanaan program/kegiatan Pemkab. HSS	40 SKPD	600.188.900	40 SKPD	368.832.550	
	Penyusunan LKPJ dan LPPD Kepala Daerah	Penyampaian LKPJ, LPPD dan ILPPD Kab. HSS	Ketepatan waktu penyampaian Laporan	254.050.000	Ketepatan waktu penyampaian Laporan	131.485.000	
	Percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi	Jumlah penyelesaian tapal batas desa dan kelurahan	11 Kec	282,265,000	11 Kec	226.954.500	

Implementasi Kerjasama Pemerintah Daerah			62,250,000		9.998.400
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan DPRD, Instansi Vertikal dan SKPD Lingkup Pemkab HSS	Fasilitasi Pemkab HSS dengan instansi vertikal	3 Forkopimda	62,250,000	3 Forkopimda	9.998.400
C BAGIAN HUKUM					
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan			691,044,380		500.126.470
Peningkatan pelayanan penanganan perkara	Jumlah Penyelesaian Perkara kepada Unsur Pemerintah Daerah yang Tersangkut Kasus Hukum	2 Perkara	139.940.000	2 Perkara	49.161.000
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	Jumlah Prolegda (inisiatif eksekutif) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	13 Perda	190.860.000	13 Perda	163.669250
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Produk Hukum Daerah di Kecamatan	8 Kegiatan	58,880,000	8 Kegiatan	56.580.000
Publikasi dan Dokumentasi peraturan perundang-undangan	Terdokumentasikannya produk hukum daerah	100 persen	136.144.380	100 persn	121.996.500
Penyusunan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia	Jumlah Kegiatan Desiminasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia	4 Laporan	51.800.000	4 Laporan	45.375.720
Penyuluhan Hukum Terpadu	Jumlah Kegiatan penyuluhan hukum terpadu	7 Kegiatan	113.420.000	7 Kegiatan	63.314.000
D BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
Program Peningkatan Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah			6.402.387.500		4.720.471.849
Penyusunan petunjuk teknis pembinaan usaha sekolah	Jumlah usaha sekolah yang dibina	22 sekolah	18,225,000	22 sekolah	7.613.100
Pelaksanaan pelayanan kegiatan keagamaan	Persentase kegiatan keagamaan yang dilaksanakan	100 %	2.686.712.500	100 %	2.388.158.800
Penghargaan kepada masyarakat berprestasi	Jumlah pemberian penghargaan kepada masyarakat berprestasi	400 orang	1.400.300.000	400 orang	400.174.600
Pelayanan penyelenggaraan haji daerah	Terfasilitasinya penyelenggaraan haji daerah dan Tim TPHD	1 kali	214.290.000	1 kali	199.422.008
Pelaksanaan MTQ tingkat provinsi dan pengiriman kafilah tingkat nasional	Jumlah kafilah dan pendamping yang mengikuti Kegiatan MTQ Kabupaten dan Propinsi yang dilaksanakan	100 orang	938.005.000	100 orang	685.785.241
Pembinaan hafiz dan hafizah Al Qur'an	Jumlah santri pondok pesantren penghawal Al Qur'an yang dibina	40 Orang	1,144,855,000	40 Orang	1.039.318.100
E BAGIAN EKONOMI, PEMBANGUNAN dan TATA USAHA					
Program Perumusan Kebijakan Ekonomi Pembangunan			113,625,000		30.385.000
Penyusunan dokumen Pengendalian Laju Inflasi Daerah	Rapat koordinasi yang dilaksanakan	4 rakor	64,650,000	4 rakor	22.984.500
Penyusunan dokumen Pengelolaan Corporate Sosial Responsibility (CSR)	Rapat koordinasi yang dilaksanakan	4 rakor	48,975,000	4 rakor	7.400.500
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4,522,275,970		1,518,481,537
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai dan Prangko yang tersedia	1741 lembar	3.250.000		600,000

Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia 67 Jenis	66 Jenis	169,009,220	66 Jenis	105.765.300
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12 bulan	79.491.750	12 bulan	49.470.500
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan pelayanan perjalanan dinas terlaksana	12 bulan	4.153.525.000	12 bulan	3.155.128.433
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Bulan pelayanan perjalanan dinas terlaksana	12 bulan	528,000,000	12 bulan	239.066.442
Pelatihan/ Outbond Pegawai Setda	Jumlah Aparatur yang mengikuti Kegiatan Outbond	140 Orang	70,000,00	140 Orang	70.000.000
Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pameran dan Pawai pembangunan	2 Kegiatan	19,000,000	2 Kegiatan	14.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			706.254.950		448.746.000
Pelaksanaan Program Kerja KORPRI	Jumlah Program kerja KORPRI terlaksana	1 program	706.254.950	1 program	448.746.000
Program peningkatan Perencanaan, Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			10,000,000		1.102,500
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang Dihasilkan	10 Laporan	10,000,000	10 Laporan	1.102.500
F BAGIAN PROTOKOL DAN KEHUMASAN					
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah			2.349.742.500		1.768.323.887
Keprotokolan Acara Bupati dan Kegiatan Pemerintah Daerah	Jumlah kegiatan Keprotokolan yang dilaksanakan	200 Kegiatan	446.972.500	200 Kegiatan	336.842.386
Komunikasi Pelaksanaan Tugas Pimpinan Daerah	Terlaksananya Tugas Komunikasi Pimpinan Daerah	80 %	1.039.745.000	80 %	627.812.335
Peliputan dan Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah/Wakil Kepala daerah	Jumlah kegiatan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah yang di liput dan didokumentasikan dalam 1 Tahun	200 Kegiatan	863.025.000	200 Kegiatan	803.669.166
G BAGIAN UMUM					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.781.157.000		2.011.523.592
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	865.527.000	12 Bulan	785.482.900
Penyediaan makanan dan minuman	Bulan layanan penyediaan makanan dan minuman dalam rangka menunjang kegiatan-kegiatan Setda Kab. HSS	12 bulan	1.915.630.000	12 bulan	1.226.040.692
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			7.098.413.480		6.102.046.875
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Mobil jabatan layak pakai	4 Unit	500,280,000	4 Unit	140.797.791
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kendaraan Dinas layak pakai	30 Unit	619.061.000	30 Unit	401.297.172
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	1.988.170.250	12 Bulan	1.771.584.650
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	60,850,000	12 Bulan	60.000.000
Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur	12 Bulan	202.775.000	12 Bulan	199.607.000
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan	Tersedianya rumah jabatan yang representatif	12 Bulan	559.650.000	12 Bulan	455.099.744

	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor layak pakai	12 Bulan	86.000.000	12 Bulan	57.310.500
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Gedung Kantor aset Pemkab.HSS Terpelihara dan layak pakai	12 Bulan	1.318.152.230	12 Bulan	1.259.066.332
	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Gedung Kantor kondisi baik	12 Bulan	1.763.475.000	12 Bulan	1.757.283.686
	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah			1.001.250.000		797.488.500
	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	bulan layanan terselenggaranya penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri	12 Bulan	521.250.000	12 Bulan	317.541.600
	Urusan Rumah Tangga KDH / WKDH	Bulan Layanan urusan Rumah Tangga KDH / WKDH	12 Bulan	480,000,000	12 Bulan	479.946.900
H	BAGIAN ORGANISASI					
	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur dan Instansi Pemerintah			309.081.100		207.946.516
	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Persentase OPD yang Mengumpulkan SAKIP Secara Tepat waktu dan Benar Sesuai Ketentuan	100 %	309.081.100	100%	207.946.516
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik			241.665.900		151.633.570
	Ketatalaksanaan di Lingkungan Pemkab HSS	Persentase pembuatan KTP PNS, penyusunan SOP, penyusunan SP dan pengukuran SKM yang terlayani	100 %	28,184,000	100 %	16.125.000
	Penataan Prosedur Kerja di Lingkungan Pemkab HSS	Jumlah prosedur kerja yang dibuat di Lingkungan Pemkab HSS		34,794,500		17.305.000
	Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah OPD / Unit Pelayanan yang Telah Menyusun Proposal Inovasi Pelayanan Publik Sesuai Ketentuan	20 OPD/Unit Pelayanan	178.687.400	20 OPD/Unit Pelayanan	118.203.570
	Program Perumusan Kebijakan penyelenggaraan Organisasi dan Aparatur Daerah			172.012.750		41.398.750
	Pengkajian Kelembagaan dan Analisis Formasi Jabatan Perangkat Daerah			172.012.750		41.398.750
H	BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA					
	Program peningkatan pelayanan pengadaan barang dan jasa			1.159.204.000		988.496.092
	Pelayanan pengadaan barang dan jasa	Jumlah Permohonan pengadaan Barang dan Jasa dari SKPD yang diselesaikan	100 %	563.304.000	100 %	459.825.076
	Pembinaan SDM, Konsultasi dan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah SDM, konsultasi dan Bimtek yang dilaksanakan	200 orang	54.785.000	200 orang	40.633.000
	Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang diselesaikan	100 %	541.115.000	100 %	488.038.016

Sumber : LKj bagian-Bagian , 2019, data diolah

BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 Sasaran IKU, 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum realisasi masing-masing IKU telah dapat diukur capaiannya dan tercapai sesuai dengan target. Sementara 2 IKU yang lain masih belum dapat diukur karena evaluasi untuk 2 indikator tersebut masih belum dilaksanakan.

Secara umum disimpulkan bahwa bahwa Sekretariat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada dijalur yang tepat dalam rangka pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Indikator Kinerja utama Sekretariat daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan, khususnya untuk Tahun Anggaran 2019 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari